



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

RENCA
AKSI KINERJA

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	5	RENCANA PELAKSANA				PELAKSANA	
				T1	T2	T3	T4		
1	3	4		6	7	8	9	10	
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	6709	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	√	√	√	√	Sub Bagian Perencanaan
2	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	6709	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	√	√	√	√	Sub Bagian Perencanaan
3	Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	6709	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	√	√	√	√	Sub Bagian Perencanaan
4	Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%	6709	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	√	√	√	√	Sub Bagian Perencanaan
5	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
6	Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
7	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
8	Presentase Anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku yang di seleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
9	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
10	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang	100%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
11	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satter (Provinsi/Kab	6981	Pembentukan Badan Adhock	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
12	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan
13	Jumlah laporan sistem akuntansi dan laporan keuangan	2 Lap	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan
14	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan

15	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan
16	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan
17	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	3355	Negara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan
18	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
19	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
20	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
21	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
22	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
23	Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
24	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
25	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
26	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
27	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
28	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	6982	Pemeriksaan Internal KPU	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
29	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	6982	Pemeriksaan Internal KPU	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
30	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APJP yang ditindaklanjuti	75%	6982	Pemeriksaan Internal KPU	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
31	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	6982	Pemeriksaan Internal KPU	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
32	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
33	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 Orang	6981	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
34	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%	6709	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM
35	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	6709	Advokasi dan Sengketa Hukum	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM

36	Penurunan Jumlah Sengketa Hukum yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 Perkara	6982	Advokasi dan Sengketa Hukum	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
37	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	88%	6982	Advokasi dan Sengketa Hukum	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
38	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	6709	Penetapan Data Wilayah Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
39	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	6709	Proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
40	Persentase calon peserta pemilu yang dapat di fasilitasi	12 Satter (Provinsi/Kab	6709	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
41	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%	6709	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
42	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satter (Provinsi/Kab	6709	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
43	Persentase Satter KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%	6709	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
44	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	6709	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
45	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemuda	100%	6709	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemuda	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
46	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas	100%	6709	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
47	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	6709	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
48	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%	6709	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
49	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	6709	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
50	Persentase informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satter (Provinsi/Kabupaten/Kota)	6709	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas

51	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilhan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	6871	Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
52	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	6871	Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
53	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilhan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	6871	Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
54	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik pemilu/pemilhan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilhan	100%	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
55	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	12 Sater 12 Sater	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
56	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	12 Sater (Provinsi/Kabupaten/Kota)	6871	Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
56	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilu secara berkelanjutan	100%	6709	Data dan Informasi	√	√	√	√	Sub Bagian Data dan Informasi
57	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	6709	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	√	√	√	√	Sub Bagian Data dan Informasi
58	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%	6709	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	√	√	√	√	Sub Bagian Data dan Informasi

Ambon, Januari 2024
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
 Provinsi Maluku

